

## **SEJARAH KOMUNITAS TIONGHOA DI YOGYAKARTA 1900-1942**

**Yudi Prasetyo**

(Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP PGRI Sejarah,  
[Prastyudi@yahoo.com](mailto:Prastyudi@yahoo.com))

### **Abstrak**

Artikel ini mengulas tentang sejarah terbentuknya komunitas Tionghoa di Yogyakarta yang menitikberatkan pada hubungan sosial ekonomi dengan masyarakat Pribumi dan pemerintah kolonial Belanda di kota Yogyakarta pada periode 1900 – 1942. Disamping itu juga membahas status dan peran (*status and role*) etnis Tionghoa, kebijakan pemerintah Belanda, dan implikasinya terhadap etnis tersebut. Tujuan artikel ini adalah merekonstruksi dinamika kehidupan dan aktivitas ekonomi perdagangan etnis Tionghoa dalam perspektif kajian historis. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian ilmu sejarah dengan menggunakan sumber sejarah berupa arsip Belanda, referensi literatur baik dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Belanda serta didukung dengan teori sosial dan data statistik.

**Kata kunci:** *Komunitas, Tionghoa, Yogyakarta*

### **Abstract**

This article is reviewing about the history of how was Tionghoa community was built in Yogyakarta. It foccusses to the social economy relationship of the indigenous people and the Holland government colonialism in Yogyakarta city in 1900 – 1942 .In addition to that, it is also discussing about the status and role of Tionghoa ethnic, Holland government's policy and the implkication to the ethnic. The aim of this article is to reconstruct the life movement and the economy and trading activities of the Tionghoa ethnic in the hitorical view. The method used in this article is the research method in history research using the historical source of the Holland files, Literature references not only in bahasa Indonesia but also in English and Dutch. It is also supported by the social theory and statistic data.

**Key words:** *Community, Tionghoa, Yogyakarta*

## **PENDAHULUAN**

Kapan komunitas Tionghoa di Yogyakarta mulai terbentuk? Tentunya ini merupakan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Ada sumber yang mengatakan bahwa komunitas Tionghoa di Yogyakarta telah ada dan hidup menetap sejak awal berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan orang Tionghoa ini dibuktikan dengan adanya seorang kapten Tionghoa yang bernama To In (1755-1764) untuk daerah Mataram yang diangkat oleh pemerintah Belanda.

Pendapat berbeda mengatakan bahwa sejak tahun 1756, orang Tionghoa telah berada di Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat Sultan Hamengku Buwono I (Pangeran Mangkubumi) mendirikan kota Yogyakarta, komunitas Tionghoa peranakan telah ada dan terbilang cukup mapan

Sementara menurut sumber lain, etnis Tionghoa khususnya suku Hokkian, diperkirakan sudah ada yang tinggal di Yogyakarta pada abad XVI. Pada awalnya orang Tionghoa yang datang berasal dari “kaum Adam”, karena pada masa itu transportasi masih sangat sulit.

Oleh karena itu, banyak diantara orang Tionghoa yang menikah dengan wanita Jawa (pribumi). Hasil keturunan Tiongkok-Jawa inilah yang kemudian disebut dengan orang Tionghoa peranakan.

Kawin campur ini semakin berkurang semenjak semakin banyaknya wanita Tionghoa yang datang ke Indonesia pada awal abad XX seiring dengan dibukanya Terusan Suez dan semakin membaiknya transportasi yang memudahkan akses masuknya orang Tionghoa dari Tiongkok ke Hindia Belanda, khususnya ke Yogyakarta.

Keberadaan kaum Hawa dari negeri Tiongkok atau wanita pribumi yang dinikahi oleh masyarakat etnis Tionghoa tentunya berdampak pada disorientasi kultur dan kehidupan sosial ekonomi Tionghoa dalam masyarakat Bumiputera maupun pemerintah Belanda. Kajian ini mencoba merekonstruksi, menganalisis, dan menafsirkan bagaimana kehidupan aktivitas ekonomi perdagangan komunitas etnis Tionghoa di Yogyakarta dalam konteks sosial ekonomi terkait dengan adanya berbagai kebijakan maupun restriksi politik dari pemerintah kolonial pada periode 1900 – 1942.

Era 1900 dijadikan sebagai batasan awal dikarenakan pada periode tersebut merupakan era modernisasi global yang juga berdampak pada perubahan wajah kota Yogyakarta dari segi infrastruktur maupun sarana prasarana sehingga menjadikan Yogyakarta sebuah kota kerajaan yang menjadi kota kosmpolitan. Sedangkan periode 1942 dijadikan sebagai batasan akhir kajian karena artikel ini memfokuskan pada era pemerintah kolonial sebelum masuknya era transisi pendudukan Jepang pada tahun 1942.

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, terutama metode ilmu sejarah dimana di dalamnya terkandung prosedur: heuristik (pengumpulan sumber terkait), verifikasi dengan kritik sumber internal dan eksternal, interpretasi atau hermeunitika, dan historiografi (proses penulisan kajian sejarah). Sumber-sumber yang digunakan berupa sumber primer dokumen dan arsip Belanda, studi pustaka melalui referensi literatur yang relevan, dokumentasi audio visual kehidupan masyarakat *Tempo Doeloe*, wawancara dengan saksi hidup / keturunan generasi berikutnya dengan menggunakan metode sejarah lisan, dan didukung dengan pendekatan teori-teori

sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga menghasilkan sebuah kajian yang komprehensif.

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk mendokumentasikan, merekonstruksi, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan bagaimana dinamika kehidupan etnis Tionghoa di Yogyakarta pada era modernisasi awal abad XX serta mampu memberikan warna dan sumbangsih dalam historiografi sejarah Indonesia terutama kajian tentang etnis minoritas Tionghoa.

Tulisan-tulisan tentang orang Tionghoa di Yogyakarta yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian skripsi adalah tulisan Peter Carey dengan judul "Orang-orang Jawa dan Masyarakat Cina 1775-1825" yang dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam memahami latar belakang historis dan keberadaan orang-orang Tionghoa di kerajaan-kerajaan Jawa pasca Perjanjian Giyanti tahun 1755.

Selain itu, buku ini juga membantu mengungkap aktivitas ekonomi orang Tionghoa dan kaitannya dengan pemerintah kolonial atau penguasa lokal, dan juga eksistensi orang Tionghoa di

dalam birokrasi kerajaan serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan di Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Referensi lain yang relevan dengan objek kajian adalah karya-karya berbahasa Belanda dan merupakan terbitan tahun 1900-an yang mana literatur-literatur tersebut memuat data tentang kehidupan dan neraca perdagangan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, yakni: Henri Borel *De Chineezen in Nederlandsch-Indie* terbitan 1900 yang mengupas bagaimana kehidupan etnis Tionghoa di Hindia Belanda, baik kawasan Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Maluku. Karya tersebut sinergis dengan kajian J.L. Vleming Jr. dengan *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsche-Indie*, terbitan 1926 yang membahas bagaimana aktivitas ekonomi perdagangan etnis Tionghoa di Hindia Belanda.

Kat de Angelino dengan *Batikrapport, Betreffende Eene Gehouden Enquete naar de Arbeidstoestanden in de Battikkerijen op Java en Madoera* mencatat dengan komprehensif tentang perusahaan batik cap serta kehidupan pekerja pribumi yang dikelola orang

Tionghoa. Demikian halnya dengan karya Soerachman, terbitan 1923, dengan judul *Mededeelingen van de Afdeeling Nijverheid No.1 Het Batikbedrijf in de Vorstenlanden* menitikberatkan pada bagaimana perusahaan batik yang berproduksi di radius lingkungan tanah keraton (*Vorstenlanden*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Orang Tionghoa di Yogyakarta merupakan minoritas. Jumlah orang Tionghoa pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda sekitar 10.000 orang dan berkelompok di Pecinan kota Yogyakarta atau tersebar di sepanjang jalan-jalan dan jalan utama sebagai pemilik toko eceran atau klontong. Keadaan ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah Hindia Belanda yang menentukan dan menempatkan orang Tionghoa di suatu wilayah yang terkonsentrasi.

Hal ini dimaksudkan agar memudahkan pengawasan masyarakat etnis Tionghoa Yogyakarta oleh pihak pemerintah Hindia Belanda. Konsentrasi pemukiman tersebut dikenal dengan sebutan Pecinan yang biasanya terdapat di ibukota kabupaten. Namun pada tahun

1830, masih banyak orang Tionghoa yang tinggal di luar wilayah Pecinan bahkan terdapat sumber yang mengatakan bahwa pada tahun 1867 pemukiman orang Tionghoa di Yogyakarta masih menyebar dan belum terkumpul menjadi satu, sehingga mereka dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan selain berupa harus tinggal di tempat yang telah ditentukan, orang Tionghoa yang tinggal di luar Pecinan itu juga dikenakan denda sebesar f. 20 hingga f. 100.

Seiring dengan perkembangan kota Yogyakarta yang dimulai pada pertengahan abad XVIII ketika keraton dibangun, orang Tionghoa diberikan tempat tersendiri untuk tempat tinggal yakni di sebelah utara keraton tepatnya di ujung utara Jalan Malioboro. Semenjak tahun 1867 pemukiman orang Tionghoa di Yogyakarta mulai menyebar di daerah ibukota Yogyakarta. Daerah-daerah pemukiman tersebut meliputi Ketandan, Gandekan, Ngabean, Ngadiwinatan, dan Suranatan.

Awalnya rumah mereka kecil dan kotor tetapi lama-kelamaan rumah mereka semakin luas dan tinggi ibarat merambat melalui gerbang keraton selatan. Bahkan pemukiman orang Tionghoa kemudian

meluas ke barat daya hingga ke Gading dan Ngasem. Sebetulnya hal tersebut dilarang tetapi orang Tionghoa tetap mengabaikan peraturan. Tempat pemukiman orang Tionghoa yang lain yakni di daerah Patuk ke utara hingga dekat jalan kereta api di sebelah barat Tugu. Kawasan Pakualaman juga telah ada penduduk Tionghoa.

Daerah luar kota yang juga digunakan orang Tionghoa sebagai tempat tinggal yakni di Godean. Pada tahun 1916, sebagai kelanjutan dari peraturan sebelumnya, ditentukan daerah mana saja yang dapat mereka huni di dalam kota Yogyakarta, yang telah ditetapkan dengan *Rijksblad* no. 4 tahun 1867. Adapun wilayah tersebut adalah Kranggan, Malioboro, Ketandan, dan Ngabean. Peraturan ini direvisi dengan adanya *besluit* tanggal 31 Desember 1902 no. 10062 P & 10063 P, sekaligus memperluas daerah tempat tinggal komunitas Tionghoa di Yogyakarta.

Walaupun peraturan pembatasan tempat tinggal itu baru dicabut pada tahun 1919 (I. Stb:150), dan sebagai akibatnya terjadi penyebaran dalam skala besar pedagang Tionghoa pada dekade 1920 ke pedalaman Jawa, meski sebenarnya pada

tahun 1916 orang Tionghoa telah diperbolehkan untuk bertempat tinggal sesuai dengan yang mereka inginkan dan sudah boleh bepergian keluar kota tanpa surat ijin jalan atau *Passenstel*. Namun kenyataannya masih banyak dari orang Tionghoa yang tetap memilih tinggal di kota. Sebagai pedagang, orang Tionghoa tentunya lebih memilih tempat yang strategis di kota.

Bagi bangsa Tionghoa, dan seperti halnya bangsa Barat, pada dasarnya kota merupakan ruang yang bersifat heterogen, berkedudukan mewah, istimewa, tempat berkumpulnya pusat-pusat penggerak ekonomi pertukaran barang-jasa, dan tempat berkembangnya gaya hidup yang berkelas. (Boediono,1981:19)

Selain kebijakan tempat tinggal, dan diberlakukan aturan surat jalan (*Passenstelsel*), namun tetap saja ada yang bisa bergerak bebas yaitu orang-orang Tionghoa yang membawa keuntungan bagi usaha pemerintah, misalnya: pemegang sewa pajak hasil bumi pemerintah. Orang Tionghoa inilah yang diberi hak istimewa oleh pejabat Belanda yang berkuasa pada daerah

setempat. Sama seperti peraturan tempat tinggal atau *Wijkenstelsel*, aturan *Passenstelsel* pun dihapuskan kepada kalangan burjuis Tionghoa pada dekade kedua pada abad XX.

Hingga tahun 1900, populasi orang Tionghoa sudah lebih dari setengah juta orang di Hindia Belanda ini, yaitu: 277.000 orang berada di Jawa dan Madura, dan hampir dalam jumlah yang sama (260.000) tersebar di pulau-pulau sekitarnya. Imigrasi besar-besaran pertama (1860-1890) jumlah sekitar 318.000 orang, 40% diantaranya (128.000) bertempat di Jawa dan 60% sisanya (190.000) memperbesar jumlah populasi Tionghoa di pulau-pulau luar Jawa terutama di pesisir Timur Sumatera (sekarang Sumatera Utara), Bangka, dan Belitung.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Tionghoa di seluruh Pulau Jawa ataupun di seluruh Hindia Belanda, jumlah orang Tionghoa di Yogyakarta tidak terlalu besar, akan tetapi di wilayah Yogyakarta sendiri, orang Tionghoa menempati posisi nomor dua terbanyak setelah orang Jawa. Walaupun orang Eropa secara kuantitas tidak sebanyak orang Jawa namun secara stratifikasi

sosial dan politik berada di atas orang Bumiputera.

Orang Eropa adalah kelompok minoritas yang mampu menguasai mayoritas penduduk di Yogyakarta dalam bidang politik dan pemerintahan. Demikian halnya dengan Tionghoa, dimana mereka cenderung menguasai bidang ekonomi. Orang Bumiputera yang terbesar secara kuantitas justru kedudukannya, walaupun tidak semua, rata-rata paling rendah diantara golongan yang lain. Konsentrasi orang Tionghoa di Yogyakarta adalah di wilayah perkotaan.

Pada tahun 1930 jumlah orang Tionghoa yang tinggal di Yogyakarta adalah 9.189 jiwa, sedangkan yang lainnya tersebar di beberapa wilayah kabupaten seperti *Regentschap* Adikarta 477, *Regentschap* Kulon Progo 171, *Regentschap* Bantul 1.560, *Regentschap* Gunung Kidul 267. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebaran penduduk terbesar adalah di wilayah *Regentschap* Yogyakarta yang meliputi kota Yogyakarta.

Alasan utama mengapa populasi orang Tionghoa terbanyak berada di kota terkait dengan faktor ekonomi. Kota

merupakan pusat administrasi sekaligus pusat ekonomi yang didalamnya terdapat berbagai masyarakat yang heterogen baik secara ekonomi maupun sosial sehingga dibutuhkan peran orang Tionghoa sebagai kelompok yang mampu menjawab permintaan pasar.

Menurut Henri Borel, sebenarnya orang Tionghoa memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang Eropa dalam berdagang yakni upaya menjalin hubungan yang intensif antara pedagang-pedagang Tionghoa dengan konsumen-konsumen pribumi yang membuat mereka lebih mengenal kebutuhan dan selera permintaan pasar. (Borel, 1900:24)

Faktor lain disebabkan karena target pemerintah kolonial yang pada awalnya berusaha untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan *passenstelsel* dan *wijkenstelsel*, ternyata telah menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa ini yang paling siap dengan spesialisasi usaha makanan, minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, kretek, transportasi, dan batik.



*Oetoesan Hindia, 24 Januari 1918*

Gambar I  
Iklan batik milik pengusaha Tionghoa di Yogyakarta

Apabila sekilas kita melihat orang Tionghoa yang berada di Indonesia pada umumnya dan orang Tionghoa yang berada di Yogyakarta pada khususnya, tentu kita akan menduga bahwa mereka semua sama atau homogen. Namun sesungguhnya mereka berasal dari suku dan provinsi yang berbeda dari negara Tiongkok. Orang Tionghoa yang berada di Yogyakarta berasal dari suku Hokkian, Kwongfu atau Kanton, Hakka, Tio Ciu, Hokcia, Hailan, dan Hailokhon. (Poerwanto, 2005:100-103)

Suku Hokkian merupakan suku terbanyak yang berada di Yogyakarta dan mereka juga diduga merupakan suku yang

pertama kali datang ke wilayah Nanyang dan Indonesia. Mereka menjadi suku yang terbanyak di Indonesia dan di Nanyangkarena letak provinsi Hokkian yang paling dekat dengan pelabuhan “Xian Kang” atau yang kini disebut dengan Hong Kong, sehingga lebih memudahkan orang Tionghoa perantauan untuk mencari kehidupan dan kesejahteraan di wilayah Nanyang.

Tabel I  
Penduduk Etnis Tionghoa menurut Etnis dan Jenis Kelamin 1930

No	Etnis	Kota Yogyakarta		
		Pria	Wanita	Jumlah
1	Hokkian	3.131	2.391	5.523
2	Kwong Fu	618	308	926
3	Hakka	134	69	203
4	Teo Ciu	43	25	68
5	Etnis Lain	916	948	1.864
	<b>Total</b>	<b>4.842</b>	<b>3.741</b>	<b>8.584</b>

Dari tabel I dapat terlihat bahwa suku Hokkian merupakan suku terbanyak diantara suku yang lain dan merupakan suku yang mendominasi perdagangan dalam aktivitas ekonomi baik di wilayah Yogyakarta atau Hindia Belanda, bahkan di seluruh wilayah Nanyang. Hal ini disebabkan karena latar belakang suku orang Hokkian yang telah terbiasa dengan kegiatan ekonomi perdagangan sejak



mereka meninggalkan provinsi Hokkian di negari Tiongkok

Selain itu, dari tabel tersebut juga terdapat data yang menunjukkan bahwa jumlah wanita Tionghoa di Yogyakarta lebih kecil dibandingkan jumlah pria Tionghoa. Hal ini disebabkan para perantau Tionghoa yang datang ke wilayah Yogyakarta, pada awalnya, mayoritas merupakan laki-laki dan mengakibatkan terjadinya perkawinan silang antara orang Tionghoa totok dengan wanita pribumi. Keturunan dari perkawinan inilah yang kemudian disebut dengan istilah orang Tionghoa peranakan.

Namun apabila kita cermati, perbedaan antara jumlah pria Tionghoa dengan jumlah wanita Tionghoa tidak begitu menyolok karena mulai abad XX telah banyak wanita Tionghoa yang turut serta bermigrasi ke Indonesia terkait dengan semakin membaiknya akses transportasi, maka pria Tionghoa tidak perlu lagi mempersunting istri dari kalangan pribumi.

Diketahui bahwa di kota Yogyakarta pada tahun 1930 terdapat 292 wanita Bumiputera dan 525 wanita Bumiputera di seluruh *Regentschap*

Yogyakarta yang digolongkan ke dalam golongan etnis Tionghoa. Hal tersebut menimbulkan adanya indikasi bahwa kemungkinan pria Tionghoa menikahi wanita dari kalangan pribumi, atau menjadikan wanita dari kalangan pribumi sebagai istri simpanan. Bagi pria pribumi hampir tidak memungkinkan apabila mereka menjadi suami dari wanita Tionghoa karena wanita tersebut tidak akan memilih calon suami dari kalangan yang stratifikasi sosialnya lebih rendah dari orang Tionghoa.

Sejak tahun 1930 Yogyakarta merupakan wilayah yang terpadat penduduknya di antara seluruh daerah di Pulau Jawa namun sebaliknya prosentase per tahun sangat kecil dibandingkan dengan daerah lain di Jawa. Pertambahan penduduk di Yogyakarta bukan disebabkan oleh migrasi melainkan karena pertambahan alamiah yakni kelahiran atau natalitas.

Kehidupan budaya orang Tionghoa di Yogyakarta sampai menjelang akhir abad XIX boleh dikatakan merupakan zaman Tionghoa peranakan. Periode ini disebut dengan istilah zaman Babah Jin Sing dimana telah terjadi akulturasi antara budaya Tionghoa dan Jawa. Hal tersebut

dibuktikan dengan diadaptasinya beberapa adat dan kebiasaan dalam kehidupan keluarga Jawa, contohnya kebiasaan berpantang pada waktu mengandung, “wetonan”, dan lain sebagainya. (Rustopo, 2007: 56)

Meskipun tidak bisa dibilang banyak tetapi tidak sedikit pula orang Tionghoa yang menyukai kesenian Jawa, dan lebih dari itu, mereka juga pandai dalam kesusastraan Jawa. Bahkan menurut Vleming, banyak pedagang Tionghoa yang tidak lagi menguasai bahasa Cina dan telah menuliskan pembukuannya dengan huruf Jawa. Dengan kata lain, secara umum orientasi sosial-budaya etnis Tionghoa di Yogyakarta.

Kecenderungan Tionghoa berkiblat ke Jawa disebabkan oleh kebudayaan keraton yang dianggap lebih halus. Pada masa pendudukan Jepang di Yogyakarta, status golongan orang Tionghoa totok mengalami mobilitas yang tajam. Hal ini diakibatkan kebijakan yang ditempuh Jepang. Akibat dari diwajibkannya orang Tionghoa berbahasa Mandarin/”Kuo Le” maka orang Tionghoa totok merasa kedudukannya lebih tinggi dari orang Tionghoa peranakan.

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, kemampuan berbahasa Mandarin menjadi simbol superioritas, bahkan orang Tionghoa yang tidak berpendidikan pun menjadi merasa percaya diri ketika berhadapan dengan orang Tionghoa peranakan yang pada umumnya berpendidikan Barat/Belanda.

Jika orang Tionghoa mengalami kenaikan status sosial, justru orang Belanda mengalami hal yang sebaliknya. Orang Belanda mendapat kedudukan yang terendah akibat pergantian kekuasaan ini. Orang Tionghoa pada masa ini mempunyai kesempatan besar untuk menikahi wanita-wanita hasil pernikahan orang Barat-Bumiputera (Indo). Nasib wanita-wanita Tionghoa Yogyakarta sendiri tidak seburuk wanita-wanita Indo ataupun orang Bumiputera karena agaknya tidak banyak dari mereka yang dijadikan “wanita penghibur” Jepang (Jugun Ianfu) disebabkan adanya persamaan ras dan lokasi geografis di kawasan Asia Timur. (Kwartanada, 1997:87)

## **SIMPULAN**

Eksistensi etnis Tionghoa Yogyakarta mengalami pasang-surut seiring dengan adanya berbagai kebijakan dari pemerintah yang berkuasa, baik dari kalangan keraton Yogyakarta, pemerintah kolonial Belanda hingga era pendudukan Jepang.

Sikap keluwesan dan kemampuan etnis Tionghoa dalam beradaptasi dengan pemerintah maupun masyarakat kolonial menempatkan mereka sebagai sebuah komunitas etnis yang dinamis meski terdapat beberapa kebijakan yang merestriksi mobilitas sosial vertikal dan horizontal etnis Tionghoa.

Bangsa Tionghoa sejak kedatangannya dikenal sebagai bangsa pedagang yang dikenal tekun, pekerja keras, hemat, dan sangat menjunjung tinggi budaya leluhur negeri asalnya. Kemampuan mereka dalam bersosialisasi dengan penduduk setempat membuat mereka diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Maka tidak mengherankan apabila Kesultanan Yogyakarta merekrut mereka dalam lingkungan keraton. Sehingga sultan secara turun-temurun sangat melindungi keberadaan orang Tionghoa di Yogyakarta dari berbagai tekanan yang

sifatnya intenal maupun eksternal hingga detik ini. Hal inilah yang membuat sejarah komunitas Tionghoa di Yogyakarta sangat berbeda dengan wilayah Pecinan di Batavia, Tangerang, Semarang, dan Surabaya.

Apabila Pecinan di kota-kota tersebut dibuat dengan sengaja memusatkan pada satu wilayah tertentu oleh pemerintah kolonial, maka lain halnya dengan Pecinan Yogyakarta yang sejak masa Hamku Bowono I telah hidup berdampingan selama berabad-abad, sehingga terjadi simbiosis mutualisme diantara keduanya dan proses penyebaran pemukiman penduduk Tionghoa di Yogyakarta. Maka sulit untuk menentukan secara pasti posisi yang tepat akan keberadaan Pecinan yang sesungguhnya. Selain itu, konsekuensi logis dari penyebaran tersebut adalah terjadinya asimilasi yang kental antara orang Tionghoa dengan penduduk pribumi yang kelak menghasilkan golongan orang Tionghoa peranakan.

Secara ekonomi, bangsa Tionghoa dikenal sebagai bangsa yang sangat pandai berdagang dan kreatif dalam mencari peluang usaha di bidang ekonomi, sehingga memunculkan

paradigma bahwa mereka memang memiliki bakat alami di bidang perdagangan. Hipotesis tersebut sebenarnya tidak selalu benar karena pada dasarnya orang Tionghoa terjun di bidang perdagangan karena orang Tionghoa tidak diberikan kesempatan bergerak di bidang politik sejak masa pemerintahan masih dikuasai Kesultanan Yogyakarta hingga masa pendudukan Jepang. Oleh karena itu, mereka menitikberatkan pada bidang ekonomi karena hanya di bidang tersebut bangsa Tionghoa dapat bergerak dengan leluasa karena pembatasan gerak orang Tionghoa di bidang ekonomi tidak “seketat” bidang politik.

Mereka mulai merintis usaha di bidang ekonomi sebagai buruh kasar atau petani di pedalaman. Namun seiring berjalannya waktu yang juga didukung oleh kemampuan mereka yang tidak mengenal lelah dan putus asa serta kemampuan mengembangkan jaringan sesama Tionghoa telah menempatkan orang Tionghoa mampu menguasai bidang perdagangan di Hindia Belanda.

Sangat menarik apabila kita memahami bagaimana dinamika sejarah sosial ekonomi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda. Karena orang Tionghoa

dengan berbagai keterbatasan ruang geraknya justru mampu menjadikannya sebagai “cambuk” untuk bekerja keras hingga akhirnya mampu mengisi posisi sebagai salah satu bangsa minoritas yang dibutuhkan oleh penguasa lokal maupun pemerintah kolonial karena berbagai kelebihanannya yang tidak dimiliki bangsa mana pun. Namun kemampuan mereka yang sangat berpengaruh juga harus dibayar mahal dengan posisi orang Tionghoa yang selalu ditempatkan oleh pemerintah kolonial sebagai “kambing hitam” dan berusaha dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang sebagai “mesin perang” melawan Sekutu. Pendek kata, kehadiran orang Tionghoa sangat dibutuhkan, namun pada situasi tertentu mereka justru ditempatkan atau dimanfaatkan penguasa sebagai “objek penderita”.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Arsip dan Dokumen Resmi Belanda:**

*Archieven Financien* no. 339, 341, 931.

*RegeeringsAlmanaak voor Nederlandsch-Indië van het Jaar 1816–1942 (RAI)*

*Regerings Almanak voor Nederlandsch Indië 1905, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie.* 1906. Batavia:Landsdrukkerij.

*Volkstelling 1930.* 1933. Batavia: Landsdrukkerij.

### Sumber Literatur

Anonim, 1913. *De Handel van Nederlandsch- Indie in 1911.* Batavia: G. Kolff & Co.

Angelino, Kat. 1930. *Batikrapport, Betreffende Eene Gehouden Enquete naar de Arbeidstoestanden in de Battikkerijen op Java enMadoera.* Landsdrukkerij: Weltevreden.

Boediono.1981. *Teori Pertumbuhan Ekonomi.* Yogyakarta: BPFE.

Borel, Henri. 1900. *De Chineezzen in Nederlandsch-Indie.* Amsterdam: L.J. Veen.

Carey, Peter. 1985. *Orang Jawa dan Masyarakat Cina. 1755-1825.* Jakarta: Pustaka Azet.

Data Statistik Perubahan Pendaftaran Orang Asing di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1958.

Handoko, Hani T. "Tradisi (Manajemen) Dagang ala Tionghoa",d alam Lembaga Studi Realino, tanpa tahun. *Penguasa Ekonomi dan Siasat Penguasa Tionghoa, Seri Siasat Kebudayaan.* Jakarta: Lembaga Studi Realino.

Kwartanada, Didi, 1997. "Kolaborasi dan Resinifikasi: Komunitas Cina Kota Yogyakarta pada Jaman Jepang 1942 - 1945", Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM.

Lohanda, Mona dkk. 2002.*Antara Prasangka dan Realita; Telaah Kritis Wacana Anti Cina di Indonesia.* Jakarta: Pustaka Inspirasi.

Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah*

*Terpadu Bagian II:Jaringan Asia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Noordjanah, Anjarwati. 2004. *Komunitas Tionghoa di Surabaya 1900-1946.* Semarang:Mesiass.

O'Malley, William J. 1983. "Indonesia di Masa Malaise: Suatu Studi Terhadap Sumatera Timur dan Yogyakarta di tahun 1930-an", *Prisma* 8, Agustus 1983, Jakarta: LP3ES.

Onghokham. 1982. *Rakyat dan Negara.* Jakarta: Sinar Harapan.

Poerwanto, Hari. 2005. *Orang Cina Khek dari Singkawang.* Depok: Komunitas Bambu.

Republik Indonesia. 1953. "Daerah Yogyakarta VII Tahun Republik Indonesia". The Djakarta: Kementrian Penerangan.

Rustopo. 2007. *Menjadi Jawa: Orang-orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa di Surakarta, 1895-1998.* Yogyakarta: Ombak.

Sandick van, L.H.W.. 1909. *Chineezzen buiten China: hunne beteekenis voor de ontwikkeling van zuid-oost-azië, speciaal van Nederlandsch-Indië.* Tanpa kota: 'S-Gravenhage.

Soerachman, 1923. *Mededeelingen van de Afdeeling Nijverheid No.1 Het Batikbedrijf in de Vorstenlanden.* Landsrukkerij: Weltevreden.

Surjomihardjo, Abdurrachman, 2000. *Sejarah Perkembangan Kota Yogyakarta, 1880-1930.* Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.

Suryadinata, Leo. 1986. *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917 -1942.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Tan, Mely G. (ed.). 1979. *Golongan Etnis Tionghoa di Indonesia:Suatu Masalah*

*Pembinaan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: LEKNAS LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.

Twang, Peck Yang. 2004. *Elite Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*. Yogyakarta: Niagara.

Vleming, J.L Jr., 1926. *Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsche- Indie*, Batavia: Volkslectuur.

Wardoyo, T.S., 1990. *Tan Djin Sing dari Kapiten Cina sampai Bupati Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Utama Grafiti.